BAB II
KAJIAN TEORITIS

Bab ini membahas dan mengkaji berbagai konsep yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasarakan, khususnya dalam pendidikan keagamaan (Islam). Kajian teoritis penelitian dan pengembangan model ini terutama bertitik tolak dari konsep-konsep dan kajian tentang perlunya andragogi di lembaga pemasarakan, proses pendidikan di lembaga pemasarakan, dan perubahan mental melalui proses belajar.

Secara konseptual pokok-pokok pikiran yang diajaklorasi disajikan dalam sub-sub bab sebagai berikut.

A. Perlunya Andragogi

Dalam mengkaji perlunya andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasarakan diungkapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan konsep andragogi, prinsip-prinsip andragogi, prosedur pengembangan andragogi, andragogi sebagai proses pemberdayaan dan peran fasilitator di lembaga pemasarakan. Konsep-konsep tersebut dijadikan sebagai bahan kajian penelitian dan pengembangan model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasarakan.
1. Konsep Andragogi


Uraian di atas tidak mengimplikasikan bahwa anak harus diajar secara pedagogi dan orang dewasa secara andragogi, karena keduanya memiliki asumsi
tentang bagaimana kita memandang hakekat peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Dalam pendidikan yang berpusat pada guru, gurulah yang paling dominan dan peserta didik dipandang sebagai mahluq pasif; sedangkan dalam pendidikan yang berpusat pada peserta didik, peserta didiklah yang paling dominan, dan dipandang sebagai mahluq aktif yang memiliki berbagai potensi, sementara guru sebagai fasilitator.


*I am not saying that pedagogy is for children and andragogy for adult, since some pedagogical assumptions are realistic for adults in some situations and some andragogical assumptions are realistic for children in some situations. And I am certainly not saying that pedagogy is bad and andragogy is good; each is appropriate given the relevant assumption.*

Kedewasaan seseorang tidak hanya dipandang dari segi biologis, tetapi juga dari segi sosial dan psikologis; sehubungan dengan itu, Sudjana (1993a: 50) mengemukakan:

Secara biologis seseorang dikatakan telah dewasa apabila telah mampu melakukan reproduksi. Secara sosial, seseorang disebut dewasa apabila ia melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan kepada orang dewasa. Sedangkan secara psikologis, seseorang bisa dikatakan dewasa bila ia telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusannya.

Knowles (1970) mengemukakan beberapa asumsi penting tentang karakteristik warga belajar orang dewasa: "these assumption are that, as a person matures, 1) his self-concept; 2) his experience; 3) his readiness to learn; and 4) his orientation to learning."

a. Konsep diri (self-concept)

Pendekatan pedagogi memandang bahwa perkembangan pribadi anak bergantung pada orang lain, peserta didik merupakan kepribadian yang bergantung pada orang lain, dan hampir seluruh kehidupannya diatur oleh orang yang sudah dewasa. Dalam pandangan andragogi, ketika anak menjadi dewasa mereka berkurang ketergantungannya kepada orang lain, mulai tumbuh kesadarannya dan merasa dapat untuk mengambil keputusan untuk dirinya.
sendiri. Orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai khususnya dalam mengambil keputusan. Mereka akan menolak bila diperlakukan seperti anak-anak, seperti diberi ceramah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh. Orang dewasa akan menolak situasi belajar yang bertentangan dengan konsep diri mereka sebagai pribadi yang mandiri.


Kedua; warga belajar perlu diikutsertakan dalam mendiagnose kebutuhan belajarnya. Mereka akan merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar apabila apa
yang dipelajari itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya (dalam hal ini perlu adanya upaya menyadarkan warga belajar akan kebutuhannya terhadap belajar).

Ketiga; warga belajar perlu dilibatkan dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Dalam hal, ini fasilitator lebih banyak berperan sebagai pembimbing dan manusia sumber. Dengan melibatkan warga belajar dalam proses perencanaan, mereka akan merasa bertanggungjawab terhadap pembelajaran yang dilaksanakan.

Keempat; proses pembelajaran merupakan tanggungjawab bersama antara warga belajar dan fasilitator. Dalam hal ini, keduanya memiliki kedudukan yang sejajar, dan fasilitator lebih banyak berperan sebagai sumber belajar. Dalam andragogi terdapat suatu asumsi bahwa seorang fasilitator tidak dapat mengajar dalam arti membuat seseorang belajar, tetapi hanya dapat membantu memberikan kemudahan belajar.

Kelima; evaluasi belajar dan pembelajaran orang dewasa (andragogi) mencakupkan pada evaluasi diri sendiri (self evaluation). Dalam hal ini, fasilitator lebih banyak membantu warga belajar untuk menilai bagaimana mereka memperoleh kemajuan dalam proses belajar yang dilaluiya.

b. Pengalaman (experience)

Pendekatan pedagogi memandang anak belum memiliki apa-apa, dan guru bertugas untuk mengisinya dengan berbagai pengalaman; sedangkan dalam pendekatan andragogi orang dewasa dipandang telah memiliki pengalaman. Setiap orang dewasa memiliki pengalaman yang berbeda bergantung pada
kehidupan sebelumnya, makin lama ia hidup makin bertambah pula pengalamannya. Bagi anak-anak pengalaman itu adalah sesuatu yang terjadi pada dirinya, sedang bagi orang dewasa adalah dirinya sendiri, yang merumuskan, dan menciptakan identitas dirinya berdasarkan pengalaman.

Perbedaan pengalaman antara orang dewasa dengan anak-anak memberikan beberapa implikasi terhadap proses belajar dan pembelajaran orang dewasa sebagai berikut. Pertama; proses belajar perlu lebih ditekankan pada teknik yang sifatnya menyadap pengalaman mereka, seperti diskusi kelompok, metode kasus, simulasi, bermain peran, metode proyek, demonstrasi, seminar, konfrensi kerja, dan sejenisnya. Melalui teknik-teknik tersebut, yang lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga belajar dalam proses belajar, diduga akan makin banyak pula terjadi aktivitas belajar pada warga belajar.

Kedua; belajar perlu lebih ditekankan pada proses belajar, dan terhadap hal-hal praktis yang dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan orang dewasa, pengenalan konsep baru dijelaskan melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang berasal dari warga belajar, dan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara langsung.

Ketiga; proses belajar perlu lebih ditekankan pada belajar dari pengalaman. Hal yang umum dan universal dalam proses belajar dan pembelajaran orang dewasa adalah belajar bagaimana memikul tanggungjawab terhadap belajarnya sendiri melalui penemuan sendiri tanpa diarahkan orang lain atau bagaimana mereka belajar bersama-sama dengan pertolongan temannya.
bukan sekedar berkompetisi dengan mereka, dan terutama belajar menganalisis pengalamannya sendiri.

c. Kesiapan untuk belajar (readiness to learn)

Dalam pedagogi kesiapan belajar sangat bervariasi sesuai dengan tingkat kematangan anak, sedangkan dalam andragogi kesiapan belajar berkembang dari tugas-tugas kehidupan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang dewasa. Orang dewasa memiliki kesiapan belajar yang lebih matang karena didorong oleh kebutuhannya, perubahan peran social, dan usianya. Hal tersebut memberikan beberapa implikasi dalam proses belajar orang dewasa, terutama berkaitan dengan orientasi kurikulum yang harus disesuaikan dengan peran yang sedang dijalani dan yang akan dihadapi di masa depan. Pertama; urutan kurikulum dan proses belajar orang dewasa perlu disusun berdasarkan tugas perkembangannya dan bukan disusun dengan urutan logis mata pelajaran atau berdasarkan kebutuhan lembaga. Kedua; kurikulum harus memiliki hierarkhis sesuai dengan tugas perkembangan warga belajar.

d. Orientasi terhadap belajar (orientation to learning)

Dalam pendekatan pedagogi orientasi belajar berpusat pada bahan pelajaran, sedangkan dalam pendekatan andragogi orientasi belajar berpusat pada masalah. Belajar antara orang dewasa dengan anak-anak berbeda dalam perspektif waktuunya, hal ini akan berbeda pula dalam cara memandang terhadap belajar. Bagi anak-anak pendidikan dipandang sebagai suatu proses penumpukkan
pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan akan bermanfaat bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Sedangkan orang dewasa cenderung untuk secepatnya menerapkan apa-apa yang telah dipelajarinya.

Hal tersebut mengandung beberapa implikasi terhadap proses belajar, dan pembelajaran orang dewasa. Pertama; para pendidik dalam pendidikan orang dewasa berperan sebagai fasilitator atau nara sumber yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Kedua; kurikulum tidak diorientasikan pada mata pelajaran tertentu, tetapi berdasarkan masalah yang dihadapi warga belajar di lapangan atau dalam kehidupan nyata. Ketiga; pengalaman belajar perlu dirancang berdasarkan masalah yang dihadapi untuk mendapatkan jalan ke luar yang paling efektif.

Di samping empat hal di atas, dalam proses belajar dan pembelajaran orang dewasa motivasi memiliki peranan yang sangat penting. Bila motivasi belajar bagi anak-anak merupakan motivasi eksternal yang timbul karena adanya hadiah dan hukuman, bagi orang dewasa pada umumnya merupakan motivasi internal yang tumbuh karena rasa ingin tahu yang ada dalam dirinya.

Pada dasarnya konsep andragogi dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai kegiatan PLS di Indonesia, baik dalam pendidikan keluarga, kepemudaan, kelompok belajar, pelatihan, maupun di lembaga pemasyarakatan. Konsep andragogi dapat diterapkan dengan modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian pada hal-hal tertentu, antara lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan. Dengan kata lain, penerapan konsep andragogi pada kegiatan PLS di Indonesia dilakukan dengan prinsip adaptabilitas.
Penerapan pendekatan andragogi dalam PLS, misalnya program pengentasan kemiskinan melalui "POKMAS IDT", yaitu suatu kelompok belajar yang dibentuk sebagai bagian dari delivery system pengentasan kemiskinan melalui pemberian stimulasi alat produksi berupa modal usaha. POKMAS ini dirancang berdasarkan konsep andragogi sebagai media belajar bersama para penduduk miskin agar bisa melepaskan diri dari kemiskinannya. Keunggulan POKMAS ini antara lain memiliki tujuan dan isi belajar yang jelas dan merupakan kebutuhan obyektif (objective needs) khayak sasaran. Satuan belajar yang dipilih yaitu kelompok belajar juga cocok dengan tujuan dan karakteristik khalayak sasaran.

Contoh tersebut dapat pula diterapkan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasarakan, tentu saja dengan penekanan yang berbeda. Pendekatan andragogi di lembaga pemasarakan terutama harus lebih ditekankan pada pembinaan nilai dan sikap, karena pada dasarnya nilai dan sikap merekalah yang perlu mendapat pembinaan, sementara dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan pada umumnya mereka sudah memiliki dasar-dasar yang dapat dikembangkan.

2. Prinsip-prinsip Andragogi

Andragogi disebut juga teknik melibatkan orang dewasa dalam kegiatan belajar. Keterlibatan warga belajar secara kaffah dalam keseluruhan proses belajar dan pembelajaran merupakan kunci keberhasilan pendidikan orang dewasa. Oleh karena itu pelibatan warga belajar secara aktif dalam proses belajar merupakan inti dalam proses belajar dan pembelajaran orang dewasa (andragogy).
Knowles berasumsi bahwa orang dewasa dapat belajar *(adult can learn)*. Kalaupun ada orang dewasa yang mengeluh tidak dapat belajar, itu hanyalah karena yang bersangkutan kurang percaya pada kemampuannya untuk belajar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang berkurang hanyalah kecepatan belajar, bukan daya kecerdasannya. Kemunduran kecepatan belajar tersebut berkaitan dengan bertambahnya usia yang mengakibatkan beberapa unsur fisiologis seperti ketajaman pendengaran dan penglihatan mengalami kemunduran. Lebih lanjut, Knowles mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses internal, yang secara psikologis merupakan proses pencarian kebutuhan dan perjuangan mencapai cita-cita warga belajar.


Prinsip-prinsip tersebut adalah: (a) keikutsertaan warga belajar dalam kegiatan belajar hendaklah berdasarkan suka rela serta kebutuhan dari warga belajar, (b) kegiatan belajar tersebut hendaklah respek terhadap semua warga belajar dan fasilitator dengan perasaan saling menghargai, (c) kegiatan belajar harus didasari oleh semangat kerja sama, untuk itu para warga belajar dilibatkan dalam penentuan tujuan belajar, kebutuhan belajar, materi belajar, metode dan media belajar dan mengevaluasi kegiatan belajar.

Berdasarkan analisisnya terhadap pendapat Gibb *(1960)*, Brookfield *(1986:26)* menyimpulkan beberapa prinsip pendidikan orang dewasa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar tersebut adalah sebagai berikut: a) kegiatan belajar orang dewasa harus diorientasikan pada masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari; b) kegiatan belajar orang dewasa harus dikaitkan dengan pengalaman yang telah diperolehnya; c) pengalaman belajar
hendaknya mempunyai makna bagi warga belajar yang bersangkutan; d) warga belajar harus diberi kebebasan untuk mencari dan mengembangkan pengalamannya; e) orang dewasa sebagai warga belajar hendaknya dilibatkan dalam penentuan tujuan belajar dan didorong untuk mencapai tujuan tersebut; f) orang dewasa sebagai warga belajar hendaknya memperoleh balikan dari apa yang telah dikerjakan dan kemajuan belajar yang telah dicapainya.

Lebih lanjut Brookfield (1986: 87) mengutip pendapat Miler yang mengidentifikasi enam kondisi yang prinsipal bagi keberhasilan pembelajaran orang dewasa. Keenam kondisi tersebut adalah (a) warga belajar orang dewasa dalam belajar harus dimotivasi agar berubah tingkah lakunya, (b) warga belajar harus disadarkan akan ketidakmampuannya untuk berperilaku, (c) warga belajar harus memiliki gambaran yang jelas terhadap tingkah laku yang diinginkan, (d) warga belajar harus diberi kesempatan untuk mempraktekkan tingkah laku yang diinginkan, (e) warga belajar harus mendapat dukungan atas tindakkannya yang benar, dan (f) warga belajar harus memiliki serangkaian materi yang tepat untuk dipraktekkan.

Sejalan dengan uraian di atas, Marzuki (1981) mengemukakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran orang dewasa: (a) orang dewasa memiliki gaya belajar yang berbeda, karena mereka berbeda dalam pengalaman, pikiran, konsep, dan afirmasi (pengakuan terhadap kenyataan), (b) orang dewasa akan belajar dengan mudah dalam situasi yang saling mempercayai, kerjasama dan saling menghormati, (c) orang dewasa akan belajar dengan baik bila materi yang diberikan berhubungan dengan kebutuhannya, (d) orang dewasa
akan belajar dengan baik bila mereka merumuskan sendiri tujuan belajar yang hendak mereka capai, (e) potensi belajar orang dewasa hanya akan berkembang dalam situasi belajar yang dialogis, dan (f) Masing-masing orang dewasa mempunyai pengalaman yang tidak terhingga untuk dapat dijadikan sebagai sumber belajar.

Melengkapi uraian di atas Hamdat (1999: 185) menyimpulkan sepuluh prinsip yang mendasari dan harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa, agar kegiatan membelajarkan warga belajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien yang pada gilirannya diharapkan memberikan hasil yang optimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah, (a) orang dewasa mempunyai gaya belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, (b) orang dewasa akan belajar dengan baik dalam suasana lingkungan yang menyenangkan, (c) orang dewasa akan belajar dengan baik jika materi yang diberikan berhubungan kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, (d) orang dewasa akan belajar dengan baik jika mereka dilibatkan dalam merumuskan tujuan belajar yang hendak mereka capai, (e) potensi belajar orang dewasa hanya akan berkembang dalam suasana yang dialogis, (f) orang dewasa akan belajar dengan baik apabila pengalaman masing-masing dimanfaatkan sebagai sumber belajar, (g) orang dewasa akan belajar dengan baik apabila materi belajarnya dapat dan mudah dipahami, (h) orang dewasa akan belajar dengan bergairah jika diberikan balikan tentang kemajuan belajarnya, (i) orang dewasa akan belajar dengan baik apabila teknik penyajian materinya tidak membosankan, dan (j) potensi belajar orang
dewasa akan berkembang apabila diberikan waktu untuk mempraktekkan materi belajar yang dipelajarnya.


a. Adults maintain the ability to learn.
b. Adults are a highly diversified group of individual with widely differing preferences, needs, backgrounds, and skills.
c. Adults experience a gradual decline in physical/sensory capabilities.
d. Experience of the learner is the major resources in learning situations.
e. Self concept moves from dependency to independency as individuals grow in responsibilities, experience, and confidence.
f. Adults tend to be life-centered in their orientation to learning.
g. Adults are motivated to learn by variety of factors.
h. Active learner participation in the learning process contributes to learning.
i. A comfortable supportive environment is a key successful learning

Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakikatnya berkaitan dengan bagaimana melibatkan warga belajar secara aktif dalam pembelajaran agar mereka menyadari pentingnya belajar dalam kehidupannya dan dalam menghadapi serta memecahkan permasalahan yang dihadapinya dalam kegiatan sehari-hari.

3. Prosedur Pengembangan Andragogi

Prinsip-prinsip andragogi di atas, bila diterapkan dalam perencanaan dan pengembangan program pendidikan, maka prosedur yang dilalui akan sangat berbeda dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam lembaga-lembaga

- The establishment of a climate conductive to adult learning.
- The creation of an organizational structure for participative planning.
- The diagnosis of needs for learning.
- The formulation of direction for learning.
- The development of a design of activities.
- The operation of the activities.
- The rediagnosis of needs for learning (evaluation).

Ketujuh langkah tersebut dalam pelaksanaanya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Menciptakan iklim belajar yang kondusif (the establishment of climate conductive to adult learning)

Iklim belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan. Iklim belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor fisik, faktor kemanusiaan dan hubungan antarpribadi, maupun faktor penataan organisasi pembelajaran. Dalam hal ini, iklim belajar yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan, hubungan yang harmonis antara warga belajar dengan fasilitator dan di antara para warga belajar itu sendiri, serta penataan organisasi dan bahan pembelajaran secara tepat, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan warga belajar.

Iklim belajar dipengaruhi oleh berbagai hal; seperti sarana, pengaturan lingkungan, serta penampilan dan sikap fasilitator. Iklim belajar yang

Semakin menyenangkan tataan lingkungan fisik, akan memberikan dampak positif bagi proses belajar. Para pakar psikologis aliran ekologik telah mendapatkan temuan-temuan penelitian bahwa tata warna secara langsung mempengaruhi suasana jiwa, warna-warna cerah cenderung menyiratkan keceriaan dan suasana jiwa yang optimistik, sedangkan penggunaan warna-warna suram akan memberikan pengaruh yang sebaliknya.

Kutipan tersebut menunjukkan betapa pentingnya penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif dalam belajar. Dalam kaitan ini sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, dan bina suasana dalam pembelajaran.

Model andragogi memerlukan ruangan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar dan fasilitator. Luas ruangan dengan jumlah warga belajar juga perlu diperhatikan, bila pembelajaran dilakukan di ruang tertutup; sedang di tempat terbuka perlu diperhatikan gangguan-gangguan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Sarana dan media pembelajaran juga perlu diatur dan ditata sedemikian rupa, demikian halnya dengan penerangan jangan sampai mengganggu pandangan warga belajar.

b. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang partisipatif
   
   *(the creation of an organizational structure for participative planning)*

Dalam situasi belajar yang ideal terdapat kelompok-kelompok kecil yang para anggotanya dilibatkan dalam setiap fase kegiatan belajar. Untuk itu,
fasilitator memiliki tanggungjawab memberi kemudahan dalam perencanaan dengan menyarankan prosedur dan koordinasi dalam proses belajar tersebut.

Situasi belajar yang demikian sangat cocok dikembangkan dalam kursus-kursus kecil, lokakarya dan sejenisnya. Sedangkan dalam pembelajaran yang jumlah warga belajarnya banyak, perlu dibuat kelompok-kelompok besar yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kecil. Wakil-wakil kelompok yang dilibatkan secara langsung dalam perencanaan berbagai aspek program belajar bertugas menyampaikannya dan menyepakatinya dalam kelompok kecil.

Dalam situasi belajar yang dengan berbagai alasan perencanaannya telah dibuat sebelum fasilitator berkumpul dengan warga belajar, untuk menimbulkan rasa partisipasi warga belajar, perencanaan tersebut sebaiknya disampaikan kepada warga belajar untuk dimodifikasi atau disetujui bersama sebelum pembelajaran.

e. Mendiagnosis kebutuhan belajar (the diagnosis of needs for learning)

Orang dewasa memiliki kesadaran akan kebutuhan praktis yang membawa mereka pada situasi belajar. Motivasi belajar mereka akan tinggi jika mereka menemukan instruktur yang menghargai kebutuhan-kebutuhannya dan menciptakan suatu proses belajar yang akan menemukan kebutuhan tersebut. Teknik atau metode yang sederhana dan langsung dalam dalam menilai kebutuhan adalah menanyakan pada warga belajar melalui wawancara, diskusi atau pertanyaan secara langsung.

Lebih lanjut ia mengemukakan langkah-langkah untuk mendiagnosis kebutuhan belajar sebagai berikut.

1) Instruktur menyiapkan topik-topik yang memungkinkan.

2) Menawarkan topik-topik tersebut kepada warga belajar.

3) Memberikan kesempatan atau waktu yang telah ditentukan kepada warga belajar untuk menyusun 10 topik yang ingin mereka pelajari.

4) Instruktur mengumpulkan topik-topik tersebut, menyusun prioritas kelompok dan mengajukan 10 topik yang diminati.

5) Mengajukan pada warga belajar bersamaan dengan urutan penyajiannya dan bacaan yang ditentukan.

d. Merumuskan tujuan belajar (the formulation of direction for learning)

Tujuan belajar adalah sesuatu yang ingin dicapai pada akhir suatu pembelajaran, yang berkaitan dengan perubahan perilaku warga belajar, baik pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Tujuan belajar akan mencerminkan kegiatan belajar. Seperti dikemukakan Tyler (1986) bahwa: "Tujuan belajar menjadi kriteria untuk memilih sarana belajar, bahan yang akan disampaikan, prosedur yang akan dikembangkan dan test yang akan
dipersiapkan". Tujuan ini perlu dirumuskan, karena merupakan arah kegiatan belajar, dasar untuk memilih dan mengadakan unsur-unsur belajar yang tepat, serta merupakan tolak ukur dalam evaluasi. Kegiatan belajar itu efektif apabila hasil belajar dapat membawa warga belajar kepada tujuan yang telah ditetapkan.


Apabila tujuan kegiatan belajar telah diketahui dengan jelas oleh warga belajar maka mereka perlu meyakini bahwa mereka adalah yang harus melakukan kegiatan belajar guna mencapai tujuan belajar. Tidak sebaliknya yaitu sumber belajar yang menyuruh dan memaksakan kehendaknya kepada warga belajar agar mereka berbuat untuk mencapai tujuan belajar. Sumber belajar tidak memaksa mereka untuk mencapai tujuan itu tetapi para warga belajar yang secara sadar berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Kutipan tersebut memberikan gambaran bahwa jika tujuan pembelajaran telah diketahui, disepakati dan diyakini oleh peserta, maka ia akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menerima tugas-tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien.

e. Mengembangkan rancangan kegiatan belajar \textit{(the development of a design of activities)}

Kegiatan belajar dapat ditakukan secara individu maupun kelompok, yang pengembangannya perlu dirancang sedemikian rupa disesuaikan dengan pengalaman warga belajar. Pengalaman merupakan kumpulan dari berbagai
peristiwa dan kejadian yang dialami, yang menentukan seseorang dalam pengambilan keputusan. Soebagio (1993:112) mengemukakan adanya perbedaan pengalaman orang dewasa dengan anak-anak yang mengakibatkan tiga hal penting.

(1) orang dewasa lebih banyak saling tukar menukar pengalaman dengan orang lain, tukar menukar pengalaman memperkaya pengalaman baru; (2) orang dewasa lebih banyak memiliki pengalaman sebagai landasan untuk mencari pengalaman baru, dan (3) orang dewasa lebih banyak menerima kebiasaan dan pola pikir yang mantap, karena itu sesungguhnya mereka lebih terbuka terhadap orang lain.

Dalam andragogi pada umumnya warga belajar berharap bahwa apa yang dipelajari sesuai dan dapat memperkaya pengalaman mereka. Karena orang dewasa sudah kaya dengan berbagai pengalaman, maka dalam pembelajaran disatu saat mereka bisa menjadi warga belajar, tetapi disaat lain dapat menjadi nara sumber dalam proses belajar tersebut. Dengan demikian dalam andragogi dapat terjadi pertukaran pengalaman di antara sesama warga belajar, bahkan fasilitator dapat belajar dan memperkaya pengalaman mereka dari warga belajar atau saling membelajarkan.

Orang dewasa dalam belajar menghendaki agar apa yang mereka pelajari dapat langsung dipergunakan dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk kepentingan tersebut, Soebagio (1993:115) mengemukakan daur belajar yang digunakan dalam pendekatan andragogi sebagai berikut.
1) Tahap pengalaman

Pada umumnya tahapan ini dikaitkan dengan permainan atau kegiatan lain yang dapat membangkitkan kemainan belajar. Tahapan ini memberikan kebebasan kepada peserta untuk mengeluarkan pendapatnya dan mengambahkan apa yang terjadi dilingkungannya kerjanya, dan mungkin situasi yang dihadapi pada saat ini. Proses tahapan ini penting agar warga belajar dengan cepat menghayati kejadian tersebut sebagai sumber pengalaman dan konsep yang dimilikinya. Oleh karena itu mata sajian yang akan diberikan dimulai dengan pengalaman nyata warga belajar.

2) Tahap proses

Pada tahap ini warga belajar sudah dapat menggambarkan dirinya dari pengalaman yang diperoleh dalam tahap pertama. Warga belajar diajak untuk turut serta mengembangkan pendapatnya mengenai kejadian-kejadian yang benar-benar dialami dengan menggunakan diskusi kelompok, sehingga setiap warga belajar dapat saling bereaksi terhadap pendapat dan pengalaman orang lain.

3) Tahap generalisasi

Dalam tahap ini warga belajar dapat menarik berbagai kesimpulan di antara apa yang telah dipelajari dengan kemungkinan manfaatnya bagi pengembangan organisasi dan dirinya. Metode yang dapat dipergunakan pada tahap ini adalah tanggapan secara perorangan dan kelompok.
4) Tahap penerapan

Dalam tahap ini warga belajar diharapkan telah mampu memahami mata sajian yang diperoleh dan mereka sudah dapat membuat suatu konsep pengembangan tugas, serta telah ada gambaran dalam pikiranya tentang apa yang akan dilakukannya apabila mereka kembali ke tempat tugasnya.

f. Mengelola kegiatan belajar (the operation of the activities)

Mengelola kegiatan belajar adalah menjabarkan rancangan belajar ke dalam urutan tertentu. Dalam hal ini sedikitnya berkaitan dengan tiga hal penting, yakni melibatkan warga belajar dalam pembelajaran, memilih dan menggunakan metode dalam pembelajaran, serta memilih dan menggunakan media dalam pembelajaran.

1) Melibatkan warga belajar dalam pembelajaran

Keterlibatan warga belajar merupakan hal yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran. Sudjana (1993b:30) mengemukakan syarat kelas yang efektif yaitu:

Untuk mendorong partisipasi warga belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan pertanyaan dan menanggapi respon warga belajar secara positif, menggunakan pengalaman berstruktur, menggunakan beberapa instrumen, dan menggunakan metode yang bervariasi yang lebih banyak melibatkan warga belajar.

2) Memilih dan menggunakan metode pembelajaran

Dalam pembelajaran orang dewasa, metode memegang peranan yang sangat penting, karena merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sudjana (1993:5) mengemukakan bahwa metode adalah "prosedur yang disusun secara teratur dan logis yang dituangkan dalam suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan."

Pentingnya metode dalam pembelajaran dikemukakan oleh Abdulhak (1995:44) sebagai pemicu dorongan, pengungkap tumbuhnya minat belajar, penyampaian bahan belajar, pencipta iklim belajar yang kondusif, energi untuk melahirkan kreativitas, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, dan pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar.

Pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat perlu mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Hal tersebut antara lain tujuan pembelajaran, bahan, faktor manusia, waktu yang tersedia dan fasilitas belajar. Metode pembelajaran yang sangat tepat digunakan
dalam pendidikan orang dewasa adalah metode yang menunjang proses belajar partisipatif, yang melibatkan warga belajar semaksimal mungkin.


(a) Berdasarkan pemberian informasi, yaitu ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi; (b) Berdasarkan pemecahan masalah, yaitu rembuk sejoli, diskusi kelompok kecil, diskusi kelompok besar, panel, forum debat, seminar, dan simposium; (c) Berdasarkan penugasan, yaitu drill (latihan), resitasi (penugasan), permainan (DIAD, drama, kubus pecah, role playing, sosio simulasi), work shop, dan eksperimen.

Fasilitator dan nara sumber pembelajaran orang dewasa harus trampil memilih dan menggunakan metode pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik warga belajar. Pemilihan metode yang tepat akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif.

3) Memilih dan menggunakan media pembelajaran

Dalam pembelajaran orang dewasa media berfungsi untuk memperjelas materi yang disampaikan dan untuk menciptakan kegiatan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain dapat mengurangi salah tafsir, bahan yang diberikan lebih mudah, cepat dan jelas ditangkap serta lama tersimpan dalam ingatan, karena apa yang dialami oleh warga belajar berlangsung dengan mengesankan.

Media pembelajaran pada dasarnya dapat diidentifikasikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu media lihat, media dengar dan media praktek ada juga media yang menggabungkan fungsi lihat dan dengar (audio visual aids), misalnya
tancap player hanya berfungsi sebagai media dengar, atau OHT (over head transforances) adalah media lihat, akan tetapi televisi adalah media lihat dengar. Berbagai media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran orang dewasa adalah OHT, proyektor filem, video player, radio kaset, papan tulis, flip chart, model simulator, dan televisi.

Media berfungsi membantu kelancaran pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan media yang tepat merupakan langkah yang harus diperhatikan oleh fasilitator. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran antara lain: tujuan, jumlah dan karakteristik warga belajar, ketersediaan biaya, waktu dan peralatan. Penggunaan media dalam pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan terpilih dengan baik, tepat, realistis, relevan dan berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran, sederhana, menarik, enak dipakai dan nyaman dirasakan warga belajar. Dengan demikian, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam membelajarkan orang dewasa merupakan hal yang sangat penting bagi fasilitator.

g. Evaluasi hasil belajar dan mendiagnose kembali kebutuhan Belajar (the rediagnosis of needs for learning / evaluation)

Evaluasi hasil belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Arif (1990: 80) mengemukakan bahwa pada umumnya hasil belajar dari suatu kegiatan belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk.
Pertama, peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya atas model tingkah laku yang diinginkan. Kedua, mereka mendapatkan bahwa model tingkah laku yang diinginkan itu telah meningkat baik setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi kesenjangan antara penampilan tingkah laku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan.

Kesinambungan tersebut merupakan dinamika proses belajar sepanjang hayat, pendidikan yang berkesinambungan dan andragogi. Dikatakan demikian karena kesenjangan itu akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dan hal tersebut perlu dievaluasi secara terus menerus untuk mengetahui kebutuhan berikutnya.

Lunandi (1993:57) mengemukakan bahwa dalam pendidikan orang dewasa metode evaluasi harus mencerminkan kehendak bebas yang sama seperti proses belajar itu sendiri. Dengan kata lain metoda evaluasinya harus datang dari warga belajar bukan dipaksakan dari luar. Orang dewasa harus pula belajar menilai sendiri apakah proses belajarnya menghasilkan suatu perubahan dalam dirinya. Ia pula yang menilai apakah proses belajar itu terjadi karena dirinya, karena metode belajar yang dipakai, atau karena pengaruh fasilitator.

Dalam kaitannya dengan teknik evaluasi Moekijat (1992:69) mengemukakan teknik evaluasi belajar pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sebagai berikut.

(1) Evaluasi belajar pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan; (2) Evaluasi belajar ketrampilan, dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis ketrampilan dan analisis tugas, serta evaluasi oleh peserta sendiri; (3) Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar isian sikap dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program, dan skala deferensial sematik (SDS).
4. Andragogi sebagai Proses Pemberdayaan

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan kegiatan PLS yang ditujukan kepada para pelanggar hukum agar setelah bebas mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Kindervatter (1979:13) mengungkapkan bahwa: "...nonformal education as an empowering process is oriented toward influencing socio-economic structures and relationships through group action taking". Berdasarkan kutipan tersebut maka dalam pembinaan narapidana baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar LAPAS sejauh hal itu memungkinkan dan tidak mengancam kepentingan "security and control", maka kegiatan-kegiatan pembinaan hendaknya diorientasikan pada kebutuhan sosial ekonomi dan dihubungkan dengan kehidupan narapidana kelak (setelah bebas) dengan warga masyarakat lainnya.

Peningkatan kedudukan dalam masyarakat menurut Kindervatter (1979:62-63) meliputi hal-hal berikut.

a. Akses (access), yakni memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-sumber daya.

b. Daya pengungkit (leverage), yaitu peningkatan dalam hal daya tawar kolektifnya.

c. Pilihan-pilihan (choices), yakni mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan.

d. Status (status), yaitu peningkatan citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya.
e. Kemampuan refleksi kritis (*critical reflection capability*), yaitu kemampuan menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah.

f. Legitimasi (*legitimation*), yaitu memperoleh pengakuan ahli yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

g. Disiplin (*discipline*), yaitu menetapkan standard mutu terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain.

h. Persepsi kreatif (*creative perceptions*), yakni sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap hubungannya dengan lingkungannya.

  Keadaan-keadaan yang digambarkan tersebut dapat dipandang sebagai keluaran (*output*) dari proses pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberdayaan dikatakan berhasil bila pada diri khalayak sasaran dapat diamati atau dapat menunjukkan keadaan permukaan (indikator) sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya Kindervatter menambahkan bahwa dalam NFE (*nonformal education*) *as an empowering process: "programs are designed to enable people to critically analyze their own life situations and to develop their skills required for acting to improve their situations".* Oleh sebab itu, pembinaan narapidana yang tujuannya "*resosialisasi*", programnya harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan andragogi, sehingga memungkinkan para narapidana menganalisa secara kritis situasi kehidupannya nanti di masyarakat. Dengan demikian, mereka ter dorong untuk mau, dan mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan
sikap atau nilai-nilai kehidupan agar dapat memperbaiki keadaannya ke arah yang lebih baik.

Dalam pengertian NFE as an empowering process ini terkandung makna untuk menjadikan "manusia baru" (new person) dalam masyarakat yang mencakup pengertian "improve his/her life condition" dan "make society better". Dengan demikian, pengembangan model andragogi dalam pembinaan narapidana yang bertujuan agar mereka "sadar" ini sejalan dengan konsep "empowering" seperti yang dikemukakan oleh Kindervatter. "Sadar" mempunyai makna ganda, yaitu "melihat ke belakang", menyesali dan menyadari perbuatannya yang telah lalu, dan "melihat ke depan", berani menghadapi tantangan kehidupan yang akan dihadapinya di masyarakat. Kesadaran ini akan menggugah para narapidana untuk mempersiapkan bekal kehidupan selama di lembaga pemasarakan dengan menimba pengetahuan, ketrampilan dan menginternalisasi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

5. Peran Fasilitator

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa andragogi disebut juga teknik melibatkan orang dewasa dalam kegiatan belajar. Keterlibatan ego warga belajar merupakan kunci keberhasilkan pendidikan orang dewasa. Oleh karena itu, fasilitator dituntut memiliki kemampuan dalam membantu warga belajar: (a) mengidentifikasi kebutuhan, (b) merumuskan tujuan belajar, ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar, serta (d) ikut serta mengevaluasi kegiatan belajar (Srinivasan, 1979). Dalam hal ini, setiap
sumber belajar harus berusaha melibatkan warga belajar seaktif mungkin pada setiap aspek kegiatan pembelajaran.

Untuk kepentingan tersebut, Knowles (1984:117) mengemukakan prosedur yang harus ditempuh oleh fasilitator sebagai berikut.

The andragogical teacher (facilitator, consultant, change agent), prepares in advance a set of procedure of involving the learners (and others relevant parties) in process involving this elements: (a) establishing climate conducive to learning; (b) creating a mechanism for mutual planning; (c) diagnosing the needs for learning; (d) formulating program objectives (which its content) that will satisfy these needs; (e) designing pattern of learning experiences; (f) conducting these learning experiences with suitable techniques and materials; and (g) evaluating the learning outcomes rediagnoising learning needs.

Berdasarkan asumsi bahwa orang dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak dalam belajar, maka strategi, pendekatan, metode dan teknik pembelajarannya pun harus dilakukan secara khusus. Dalam pada itu, konsepsi tentang guru dan peranannya telah berubah pula seiring dengan tuntutan perubahan jaman. Bila semula guru dianggap sebagai orang yang serba tahu, maka pada perkembangan berikutnya dimaknakan sebagai orang yang pintar membelajarkan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Carl Rogers, dalam Knowles (1984:75), "...the role of the teacher as that of a facilitator of learning". Dalam hal ini, peran guru lebih diorientasikan sebagai fasilitator belajar. Dari sinilah muncul istilah fasilitator dalam terminologi pendidikan luar sekolah dan teknologi pembelajaran. Lebih lanjut Rogers mengemukakan hal-hal yang harus dimiliki oleh fasilitator dalam hubungannya dengan andragogi, yaitu keterbukaan, kepedulian, penghargaan, penghormatan, penuh pengertian, peka, dan mau
mendengarkan pendapat warga belajar. Dalam hal ini, Rogers juga memberikan arahan perilaku yang harus dimiliki fasilitator sebagai berikut (Knowles, 1984:76).

a. Dapat bekerja dengan banyak memperhatikan latar kemauan yang utama dalam suasana sosial kelompok.

b. Dapat membantu memilah dan mengakomodasikan tujuan-tujuan individual di dalam kelas menjadi tujuan kelompok pada umumnya.

c. Mengutamakan pemenan kebutuhan setiap warga belajar dengan maksud sebagai dorongan agar dapat belajar dengan giat.

d. Berusaha keras mengorganisir sumber belajar dan memudahkan penggunaannya seluas mungkin bagi pembelajaran.

e. Memandang dirinya sebagai sumber belajar yang luwes untuk dimanfaatkan kelompok belajar yang dibinanya.

f. Menanggapi tanggapan dan perilaku warga belajar dalam kelompok baik sebagai konten akademik maupun ungkapan sikap-sikap, dan berusaha keras memberikan perkiraan tingkatan kepentingan yang mana untuk individu atau untuk kelompok.

g. Bertindak sebagai partisipan, anggota kelompok, dan mengekspresikan diri sebagai pribadi yang tunggal.

h. Dapat berinisiatif mengidentifikasikan dirinya dengan kehidupan kelompok, perasaannya seperti apa yang diajarkan pada anggotanya.
i. Melalui serangkaian pengalaman dalam kelompok belajar, fasilitator tetap waspada terhadap ekspresi yang menunjukkan dangkal atau dalamnya minat belajar.

j. Berusaha keras untuk menerima segala keterbatasan yang dimilikinya.

Dalam pendekatan belajar yang berorientasi pada warga belajar (self directed learning), sedikitnya pembina pembelajaran memiliki peran sebagai berikut.

a. Sebagai transmitter isi pembelajaran

Untuk melaksanakan perannya sebagai transmitter isi pembelajaran, fasilitator perlu memperhatikan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) apa yang harus dipelajari oleh warga belajar?; bagaimana mengorganisasikan isi pembelajaran ke dalam unit-unit belajar?; 3) bagaimanakah unit-unit belajar ini diorganisasikan ke dalam urutan yang logis?; dan 4) bagaimanakah mentransmisikan unit-unit belajar secara efektif?

b. Sebagai fasilitator belajar

Tanggungjawab fasilitator yang pertama adalah membantu warga belajar mengembangkan kemampuannya secara optimal. Untuk kepentingan tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1) Berilah pertanyaan kepada warga belajar secara individual berkaitan dengan kemampuan belajarnya.
2) Bantulah warga belajar dalam membentuk kelompok-kelompok belajar, yang jumlahnya antara dua sampai lima orang. Kemukakanlah masalah yang harus mereka pelajari dalam kelompok, dan mereka hanya boleh menghadap seandainya ada permasalahan yang perlu dibantu.

3) Pahamilah berbagai permasalahan yang dihadapi warga belajar. Dalam hal ini setiap pembina pembelajaran orang dewasa dapat membikin suatu "workshop" dalam waktu sekitar tiga hari, dan fasilitator bertugas: menciptakan iklim pembelajaran yang cocok untuk orang dewasa; menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang partisipatif; mendagnosis kebutuhan belajar; merumuskan tujuan; mengembangkan rancangan kegiatan belajar; melaksanakan kegiatan belajar dan menghubungkannya dengan pengalaman warga belajar; serta menilai proses dan hasil belajar yang telah dicapai.

Terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan peran baru guru sebagaimana dikemukakan di atas. Permasalahan tersebut sedikitnya berkaitan dengan masalah struktur belajar dan pembelajaran, isi pembelajaran (apa yang dipelajari), dan masalah kelembagaan. Dalam hal ini, masih banyak warga belajar yang memposisikan pembina pendidikan dalam peranannya pada pendidikan yang berpusat pada guru dan pada pandangan lama. Dalam hal ini, sebagai fasilitator dan sebagai sumber dalam kegiatan belajar, pembina pembelajaran harus mampu memberi kemudahan belajar, dan harus mampu memberikan jalan ke luar terhadap setiap permasalahan yang dihadapi warga belajar.
B. Proses Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pendidikan untuk Semua

UNESCO, sebagai salah satu badan dunia yang menangani masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, dalam sidang umum pada bulan Oktober 1985 telah merekomendasikan pentingnya pendidikan bagi semua atau educational for all (UNESCO, 1985; Soedijarto, 1992; dan Depdikbud, 1993).

Upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan hal tersebut antara lain memberikan kesempatan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah (PLS) kepada mereka yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan kepada mereka yang tidak sempat atau tidak dapat menikmati pendidikan formal (continuing education). Dalam hal ini Unesco (1993) menyatakan bahwa: “continuing Education is a teaching and learning process for literate adult who have got some basic general knowledge and wish to obtain some special skills needed within a relatively short period of time in order to fulfil the needs of life within the community.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan continuing education adalah memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk memperoleh bekal-bekal kemampuan yang bermanfaat bagi peningkatan taraf kehidupannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan perlu lebih diarahkan pada pembinaan kemampuan dan ketrampilan agar mereka bisa kembali ke masyarakat secara layak serta diterima oleh masyarakat lingkungannya, sehingga mereka menyesali dan tidak mengulangi perbuatan salahnya. Dalam pada itu, pembinaan yang dilakukan juga perlu lebih ditekankan
pada masalah nilai, terutama nilai-nilai agama yang dapat membentuk pribadi para narapidana.

Pada hakekatnya pembinaan narapidana perempuan di LAPAS adalah untuk memperbaiki mental, serta memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap dasar agar kelak setelah mereka kembali ke masyarakat tidak menjadi penganggur, dan bekal yang diperolehnya dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau berwirausaha. Untuk kepentingan tersebut maka program pembinaan NAPI di LAPAS perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, baik untuk bekerja sebagai pekerja pada suatu perusahaan maupun berwirausaha dalam rangka memperoleh pendapatan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupannya. Dalam pada itu, agar pembelajaran yang berlangsung di lembaga pemasyarakatan berdaya guna dan berhasil guna, serta dalam prosesnya dapat dinikmati dengan menyenangkan oleh para narapidana, maka perlu digunakan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran orang dewasa (andragogy).

2. Pendidikan Keagamaan di LAPAS

PLS memiliki cakupan yang sangat luas, tidak terbatas pada kegiatan PKK atau kursus-kursus yang bertebaran di berbagai pelosok negeri. PLS juga mencakup berbagai jenis pendidikan di berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti di pondok pesantren, sanggar-sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, bahkan proses pendidikan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan merupakan bidang
kajian pendidikan luar sekolah, meskipun dalam kenyataannya kegiatan pendidikan dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan belum banyak mendapat perhatian dari para ahli pendidikan.

Dari sudut pandang PLS, memikirkan pendidikan bagi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu kewajiban dan panggilan moral, karena para narapidana-pun sebenarnya merupakan warga belajar yang memerlukan layanan pendidikan yang benar, agar mereka dapat memahami dirinya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi lagi kesalahannya setelah mereka kembali ke masyarakat.

PLS merupakan konsep yang muncul dalam studi kependidikan yang memberikan pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasnan dan kejuruan. Pendidikan keagamaan lebih melandasi perkembangan PLS, yang memberikan motivasi kepada warga belajar bahwa belajar itu merupakan kewajiban untuk setiap pemeluk agama, khususnya Agama Islam dan kegiatan belajar dilakukan selama kehidupannya. Motivasi agama bagi manusia adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan alam. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir, agama sangat menunjung tinggi ilmu, karena ilmu memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia dalam mengolah dan memahami lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Dalam mengembangkan kemampuan hidup di masa yang akan datang, agama memberikan motivasi untuk mengantarkan manusia guna memasuki ruang
dan waktu yang berbeda dengan yang dialami saat ini. Dalam konteks pembinaan NAPI di LAPAS, agama berfungsi mengantarkan mereka memasuki dunia masa depan setelah mereka bebas, yang tentunya akan penuh dengan berbagai macam tantangan. Untuk itu, mereka memerlukan kemampuan berfikir, ketrampilan dan sikap positif melalui pendidikan. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya peranan pendidikan bagi pembinaan NAPI di LAPAS, khususnya pendidikan keagamaan untuk menyiapkan narapidana terhadap kemungkinan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Untuk kepentingan tersebut, para pendidik (bimpas) dituntut kemampuannya untuk memantau dan memprediksi kecenderungan perubahan di masa depan, serta menerapkan model kegiatan belajar yang lebih mendekati atau cocok dengan kecenderungan tuntutan kehidupan.

Dalam proses pendidikan keagamaan di LAPAS khususnya agama Islam, yang dilakukan melalui bimbingan, pengajaran dan/atau latihan, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan narapidana dalam berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan fungsi ajaran Islam. Pendidikan Islam bagi narapidana mengandung pengertian sebagai proses bantuan dalam mengaktualisasikan potensinya ke dalam bentuk perilaku syarat norma dan bernilai dalam ukuran masyarakatnya. Narapidana adalah orang yang dianggap telah melakukan perilaku menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat berdasarkan norma hukum, kesusilaan dan agama. Untuk mengembalikan narapidana kepada perilaku syarat norma itu diperlukan bantuan melalui proses pendidikan luar sekolah yang dapat
memberikan dorongan dan mampu membangkitkan emosi untuk berbuat kebaikan melalui fungsi agama Islam.

Agama Islam merupakan pangkal dan akan menjadi akhir dari perkembangan pendidikan luar sekolah, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti belajar membaca kitab suci Al-Qur’an, memahami kaidah-kaidah agama, tata cara shalat, mendengarkan ceramah semuanya merupakan kegiatan belajar membelajarkan yang mendasari situasi pendidikan luar sekolah. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan agama Islam memberikan motivasi kepada warga belajar untuk melakukan kegiatan belajar dan melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT.


Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. ... Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

Dari kutipan tersebut dan uraian sebelumnya, rasanya tidak berlebihan seandainya dikatakan bahwa pengembangan pendidikan di lembaga pemerintah merupakan bidang kajian dan tanggungjawab pendidikan luar sekolah.

3. Tujuan Pembinaan Narapidana

Di kalangan para ahli hukum, terdapat dua teori penghukuman dalam pidana, yaitu teori pembalasan dan teori perbaikan. Di samping itu, ada teori baru yang muncul sebagai reaksi dari kelompok yang pro dan kontra terhadap dua teori tadi. Teori yang ketiga ini merupakan gabungan (fusi) dari teori pembalasan dan teori perbaikan.

Teori pembalasan memandang bahwa tujuan penghukuman bagi NAPI adalah untuk melakukan balas dendam terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh para penjahat agar mereka merasa jera dan tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Teori ini dipergunakan pada abad pertengahan melalui sistem
kepenjaran konvensional, yang memiliki karakteristik sebagai berikut

a. Bertitik tolak pada pandangan bahwa hukuman itu bertujuan untuk melakukan
balas dendam dan membuat jera pelaku kejahatan.

b. Orang-orang hukuman harus dianggap sebagai objek dari perlakuan petugas
penjara dan bukan sebagai subjek yang harus dihormati hak asasinya.

c. Masih menggunakan hukuman badan bagi orang-orang hukuman yang
melanggar tata tertib penjara berupa hal-hal sebagai berikut:

1) mengasingkan orang hukuman dalam sebuah sel yang sempit,
   sehingga hanya cukup untuk berdiri, tidak memperoleh pendidikan
   apapun, serta makan minum, buang air besar di dalam sel itu juga;

2) diharuskan memakai pakaian yang sangat sempit sehingga sangat
   sukar untuk bernafas sekalipun;

3) menyumbat mulut orang hukuman;

4) bagian tubuh orang hukuman dicap dengan besi panas;

5) disuruh duduk di atas kursi dengan kaki dan tangan terikat;

6) mengurangi jatah makanan dan minuman;

7) merantai kedua kaki dan tangan;

8) ditempatkan dalam sebuah kamar yang tertutup rapat dan tidak
dikenai sinar matahari;

9) memasukkan badan orang hukuman ke dalam sebuah peti dan hanya
   kepala yang berada di luar;
10) memandikan dengan curahan air dingin, dengan tangan dan kakinya dibelenggu;

11) pencambukan badan orang hukuman sebanyak 45 kali atau lebih;

12) mewajibkan orang hukuman memakai sepatu kulit yang sangat besar dan berat;

13) menempatkan orang hukuman di bawah tanah.

d. Cara-cara perawatan (makan, pakaian dan kesehatan) yang jauh dari memenuhi syarat yang layak dan berperikemanusian.

Pelaksanaan teori pembalasan (Vergeldings Theorie) menurut ukuran kepenjaraan Indonesia jauh dari memenuhi persyaratan perikemanusian. Sebagai reaksi teori pembalasan, muncul aliran lain yang menentang kehadiran teori itu, yaitu teori perbaikan yang juga dikenal dengan teori tujuan, teori ini mulai memperhatikan pentingnya pendidikan bagi pembinaan narapidana, seperti dikemukakan Satochid (TT.:318).

Cara-cara memperbaiki orang-orang yang telah berbuat jahat itu, dianjurkan dengan cara mendidik dan dengan jalan memberikan keahlian-keahlian tertentu untuk dapat disalurkan ke dalam lapangan-lapangan kerja yang sesuai dengan bakatnya dan juga mendidiknya dalam masalah disiplin atau ketertiban umum.

Dalam teori pembalasan para petugas penjara menggunakan cara-cara untuk membuat jera para narapidana melalui hukuman fisik yang sangat berat dengan mencabut status hak asasi manusia mereka, namun dalam teori tujuan, para narapidana diperlukan secara manusiawi dalam arti dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena perlakuan terhadap para narapidana
menurut aliran yang kedua ini tetap memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan. Tujuan pembinaan narapidana ialah untuk memperbaiki sifat-sifat jahat mereka, agar mereka mampu menemukan kembali tingkat keseimbangan hidupnya yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan.

Dari dua teori tersebut, muncul aliran ketiga yang dikenal dengan teori gabungan, yang mengkritik kedua aliran yang mendahuluiinya. Kritikan terhadap aliran teori pembalasan ialah bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penganut teori pembalasan tidak adil karena mereka tidak memperhatikan latar belakang dan motivasi para penjahat dalam melakukan kejahatannya. Kritikan terhadap pengikut aliran perbaikan atau teori tujuan ialah bahwa penganut aliran kedua pun dinyatakan tidak adil, karena mereka tidak memperhatikan kerugian masyarakat yang telah diterimanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh si penjahat. Atas dasar hal tersebut, lahirlah aliran ketiga yang dikenal dengan teori gabungan antara prinsip teori pembalasan dengan prinsip teori perbaikan.

Menurut teori gabungan, tujuan hukuman ialah untuk menegakkan keadilan antara kerugian yang diterima masyarakat dengan cara melakukan tindakan yang membuat jera para penjahat digabungkan dengan prinsip untuk memperbaiki sifat-sifat jahat para NAPI dengan cara memberikan bimbingan penyuluhan dan pendidikan kerja atau pendidikan ketrampilan. Teori ini lahir atas dasar pertimbangan keadilan antara kerugian yang diterima oleh masyarakat dengan upaya untuk memperbaiki para penjahat dari sifat jahatnya. Oleh karena itu, di samping hukuman masih ada yang dinamakan maatregal (aturan atau
tindakan yang disesuaikan) sebagai sanksi. Tujuan dijalankannya \textit{maatregal} ialah untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki si penjahat itu sendiri.

Contoh \textit{maatregal} ialah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak-anak di bawah usia pidana (dibawah 16 tahun) yang melakukan tindakan kejahatan tapi tidak dijatuhi hukuman sebagaimana orang dewasa melakukan kejahatan, mereka disimpan ditempat penitipan anak-anak nakal atau dikembalikan kepada orang tuanya dengan pengawasan dari petugas.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan; 1) memantapkan iman (ketabahan mental) mereka; 2) membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2) berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3) berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4) berhasil memupuk jiwa dan semangat pengabdian terhadap Bangsa dan negara (Depkeh, 1990: 10).

Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat antara lain apabila tingkat residivis (penjahat kambuhan) dapat ditekan serendah mungkin dan bahkan dapat dikembalikan ke titik nol, sehingga para bekas narapidana dapat
menyesuaikan sikap dan tingkah lakunya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan yang sebenarnya bergantung kepada NAPI itu sendiri, karena motivasi yang paling kuat untuk merubah sikap perilaku adalah motivasi internal bukan motivasi eksternal yang datang dari luar. Seberapa jauh bekas NAPI mempunyai niat untuk merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik menjadi sikap dan perilaku yang positif. Kebulatan tekad itulah yang dapat mendukung tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembinaan narapidana. Faktor lain yang menentukan tingkat keberhasilan tersebut antara lain sistem pengelolaan program dan para pengelolanya. Apakah sistem pengelolaan program pendidikannya sudah cocok dengan minat, kebutuhan dan kemampuan para NAPI dan apakah para pengelola programnya juga dapat menciptakan iklim yang kondusif dan menyenangkan.

4. Manajemen PLS bagi Pembinaan Narapidana

Pada jaman dahulu, sistem pembinaan narapidana tidak di tata secara profesional dan tidak memperhatikan unsur-unsur manajemen secara baik. Hal ini karena tujuan kepenjaraan jaman dulu berbeda dengan tujuan sistem pemasyarakatan sekarang. Tujuan kepenjaraan jaman dulu lebih menekankan pada prinsip balas dendam atas tindak kejahatan para penjajah, sedangkan tujuan pemasyarakatan sekarang lebih menekankan pada sistem pembinaan dengan tujuan agar para narapidana kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga
negara yang baik. Untuk kepentingan tersebut penerapan prinsip manajemen merupakan tuntutan yang harus diperhatikan dalam pembinaan narapidana.


Manajemen PLS bagi NAPI tidak cukup sampai kegiatan pengawasan (controlling), tapi harus sampai pada prinsip pengembangan, karena sistem pembinaan NAPI bukanlah kegiatan evaluasi terhadap sikap dan perilaku mereka, melainkan merupakan program pendidikan perbaikan (rehabilitasi) sikap dan perilaku. Prinsip perubahan sikap dan perilaku tersebut harus dituntaskan sampai pada prinsip pengembangan. Pengembangan program pembinaan narapidana di LAPAS disusun oleh pemerintah c.q. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikembangkan oleh LAPAS masing-masing. Pengembangan perencanaan oleh LAPAS tetap berpedoman pada perencanaan umum yang dibuat oleh departemen.

Akselerasi perkembangan IPTEK, budaya, politik, sosial ekonomi yang begitu cepat, menuntut perencanaan program PLS yang inovatif (innovative planning) bagi NAPI, karena tujuan pembinaan NAPI antara lain untuk membantu menumbuhkan makna diri dalam kehidupan yang tidak akan banyak berkembang bila mereka tidak dapat menyesuaikan dengan sistem perubahan masyarakat yang berkembang secara cepat. Perencanaan inovatif PLS bagi narapidana, diharapkan
dapat memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Perencanaan inovatif ditandai dengan upaya mengembangkan gagasan dan kegiatan baru dalam memecahkan masalah yang timbul di dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh berbagai lembaga. Berbagai keahlian teknis dipadukan dalam perencanaan untuk memecahkan masalah yang memerlukan kegiatan terpadu. Proses perencanaan tidak hanya untuk menghasilkan suatu rencana terpadu, melainkan juga untuk menumbuhkan fusi di antara para perencana dari berbagai bidang kegiatan atau lembaga terkait, dan perlunya kesinambungan antara perencanaan dan pelaksana.

Perencanaan ini biasanya diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang menyangkut pengangguran, kemiskinan, rendahnya pendidikan masyarakat, kegagalan sistem pendidikan, kependudukan, kenakalan dan lingkungan hidup. Masalah-masalah tersebut perlu dihadapi bersama dengan menggunakan perencanaan baru.

Pembinaan NAPI di LAPAS memerlukan perencanaan yang matang dan terpadu yang melibatkan semua komponen antar lembaga yang berkepentingan. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Tenaga Kerja, Depdiknas, Departemen Agama, LSM dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Manajemen PLS bagi NAPI di LAPAS harus diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari sifat jahat menjadi Jiwa yang baik, dari malas menjadi giat, dari masa bodoh menjadi bertanggung
jawab, dan dari sikap konsumtif menjadi produktif. Hal tersebut dilaksanakan secara utuh dan terpadu serta ditata melalui perencanaan yang baik.

Perencanaan yang baik dapat memperkirakan berbagai kecenderungan yang akan terjadi serta dapat menentukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan. Keuntungan lainnya adalah bahwa para petugas di lembaga pemasarakan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah secara sistematis dan teratur, dapat menenangkan tindakan dan hasil kerja yang kurang bermanfaat, mudah menentukan tingkat keberhasilan, serta mudah melaksanakan kegiatan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam manajemen PLS di samping perencanaan, masalah pengorganisasian juga perlu mendapat perhatian. Pengorganisasian PLS adalah usaha mengintegrasikan sumber-sumber manusiawi dan non manusiawi yang diperlukan ke dalam satu kesatuan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu (Sudjana, 2000:115).

Pengorganisasian akan menghasilkan pengintegrasian secara otomatis antara sikap, perilaku, pikiran serta berbagai kepentingan dengan lembaga-lembaga, lingkungan kehidupan dan sejumlah kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Pengorganisasian akan menampakkan sejumlah masalah dalam manajemen bila ada unsur organisasi yang tidak terpadu, tidak berkaitan dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, karena itu setiap unsur dalam suatu organisasi mesti dibahas serta
ditetapkan fungsi dan keterkaitannya dalam perencanaan. Jika dalam perencanaan tidak dibicarakan fungsi dan keterkaitan antar komponen, maka pengorganisasian tidak akan berjalan dengan baik dan akhirnya sistem manajemen tidak akan dirasakan manfaatnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian berkaitan dengan minat dan kemampuan personal, mekanisme dan sistem kerja, kebersamaan dan kepentingan organisasi, serta hubungan kemanusiaan, yang sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan organisasi. Hubungan kemanusiaan yang baik dapat menutupi kelemahan mekanisme kerja dan dapat mengatasi rendahnya minat para personal organisasi dalam menjalankan roda keorganisasiannya, serta dapat meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di antara sesama pengelola organisasi.

Dalam hal ini, Sudjana (2000:121) mengemukakan bahwa:

Dalam organisasi modern hubungan resmi dan hubungan tidak resmi perlu dibina. Kedua hubungan kemanusiaan ini harus saling mempengaruhi dan saling menunjang antara yang satu dengan yang lainnya. Keduanya berfungsi untuk mendukung kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terwujudnya kedua hubungan kemanusiaan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan iklim kerjasama yang demokratik, suasana saling menghargai, rasa pemilikan dan tanggung jawab bersama dan terwujudnya kepuasan dalam melakukan kegiatan ... Singkatnya, kemantapan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dinamika hubungan kemanusiaan setiap orang yang terlibat dalam organisasi itu.

Dalam kaitannya dengan sistem pengorganisasian di LAPAS hubungan kemanusiaan ini cukup banyak dirasakan oleh para penghuni lembaga. Hubungan kemanusiaan yang terjalin dengan baik di lembaga pemasarakan merupakan iklim yang kondusif, yang harus diciptakan oleh para pembina dan petugas
lembaga pemasarakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan andragogi secara proporsional.

Dalam pengorganisasian PLS, hubungan kemanusiaan yang tidak resmi harus lebih banyak dari hubungan resmi (formal). Hubungan formal biasanya diperlukan untuk menjaga kewibawaan dan mencakkan disiplin diri (self discipline) bagi para warga belajar.


Proses penggerakan kegiatan PLS bagi para narapidana, berbeda dengan proses penggerakan untuk masyarakat umum. Penggerakan terhadap para narapidana pada umumnya banyak dilakukan melalui paksana yang disertai sanksi bagi mereka yang menolak perintah kerja.

Pendekatan paksan dilakukan untuk menggerakan NAPI, karena ada pemandangan di kalangan para pembina bahwa para NAPI memiliki keadaan yang relatif rendah untuk melakukan berbagai kegiatan di lembaga pemasarakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip andragogi, yang mengungkapkan bahwa pembinaan kesadaran perlu dilakukan dengan menciptakan iklim yang kondusif, dan berangkat dari kebutuhan narapidana sebagai warga belajar. Dalam hal ini perlu ditanamkan pendekatan silaturahmi.

Pembinaan narapidana di lembaga pemasarakan sebaiknya dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. pembinaan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

b. berfungsi untuk mendayagunakan sumber-sumber (baik sumber manusiawi maupun non manusiawi);

c. menggunakan pendekatan manusiawi dengan penuh tanggung jawab;

d. pendekatan manusiawi didasarkan atas pengakuan dan penghargaan sebaik mungkin terhadap nilai-nilai insani;
e. berfungsi sebagai faktor pendorong dan faktor penarik (pengendali);

f. didasarkan atas penggunaan pengetahuan dan teknik-teknik pembinaan secara ilmiah;

g. karakteristik pembinaan pendidikan luar sekolah terdiri atas tanggung jawab, pendekatan manusiawi dan penggunaan jasa keahlian.

Tahap yang tak kalah pentingnya dalam manajemen PLS ialah penilaian. Dalam tahap ini, pimpinan penyelenggara dapat melakukan beberapa kegiatan, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lapangan tentang pelaksanaan PLS, apakah sudah berjalan sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Jika menyimpang, faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Apakah petugas yang kurang mampu melaksanakan rencana program, atau sarana yang kurang memadai, atau lingkungannya, atau warga belajarnya (narapidana), dan mungkin adanya perubahan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang berkaitan dengan rencana program tersebut.

Para petugas pun dapat melakukan dengar pendapat dengan petugas lapangan, warga belajar atau lingkungan setempat yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan PLS. Materi yang dibicarakan dalam dengar pendapat tersebut berkisar antara masalah-masalah yang dihadapi oleh para petugas dalam melakukan kegiatan PLS di lapangan. Selain itu dibicarakan pula alternatif pemecahan dan upaya pengembangannya.

Wilbur Haris yang dikutip oleh Steele, dalam Sudjana (2000:265) mengemukakan bahwa:
Evaluation is the systematic process of judging the worth, desirability, effectiveness, or adequacy of something according to definitive criteria and purposes. The judgement is based upon a careful standards. (Penilaian adalah proses penentuan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penentuan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Titik berat penilaian adalah pengamatan yang sistematik terhadap kegiatan yang telah dilakukan di lapangan dan dicocokkan dengan kriteria tujuan yang telah ditetapkan. Apakah kegiatan pendidikan luar sekolah itu dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan. Hasil pengamatan dan penilaian dijadikan sebagai bahan oleh para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pengembangan.

Langkah pengembangan yang dijadikan sebagai fungsi manajemen PLS oleh Sudjana, didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam PLS terdapat asas pendidikan sepanjang hayat (life long education). Dengan berpedoman pada dua alasan inilah, Sudjana menandang penting untuk memasukkan prinsip pengembangan ke dalam fungsi manajemen PLS. Dengan demikian, maka fungsi manajemen akan memberikan warna tersendiri bagi upaya pemaknaan PLS.

Berpedoman pada prinsip pendidikan sepanjang hayat yang mengandung makna bahwa kegiatan pendidikan tidak mengenal berhenti, maka kegiatan manajemen pendidikan luar sekolahpun harus berkelanjutan dan tidak menghentikan kegiatannya pada jenjang tertentu saja. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “mencari ilmu itu wajib
bagi semua muslim dan muslimat dari mulai buaian ibu (panggilan belajar pertama) sampai masuk lubang kubur (menghembuskan nafas terakhir)."

Di samping itu, berpedoman pada prinsip pendidikan sepanjang hayat, juga atas dasar pertimbangan bahwa kebutuhan dan pembangunan masyarakat yang cepat berubah, maka kegiatan pendidikan luar sekolah pun harus cepat mengadaptasi terhadap perubahan pembangunan tersebut, antara lain para penyelenggara pendidikan luar sekolah harus terus melakukan pengembangan-pengembangan programnya. Pengembangan dari yang produktif menjadi lebih bervariasi, pengembangan dari program yang memenuhi kebutuhan warga belajar menjadi lebih aspiratif, pengembangan dari program yang bersifat tunggal menjadi program yang multi guna, pengembangan dari program yang parsial menjadi program yang integratif, dan sebagainya.

Prinsip pengembangan PLS bagi pembinaan narapidana, dapat dilakukan di dalam dan di luar LAPAS. Di dalam lembaga pemasyarakatan, kegiatan PLS yang semula cukup sampai pada penyampaian materi dalam bentuk teori dan praktek, setelah adanya program pengembangan, maka kegiatan PLS dapat diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Umpamanya sampai membuka koperasi atau sampai pada memproduksi barang untuk dipasarkan, sehingga para narapidana dapat merasakan langsung manfaat dari program PLS sebagai program pendidikan rehabilitasi. Jika mereka dapat merasakan manfaat dari program pendidikan, mereka akan meninggalkan pekerjaan jahatnya dan mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan yang bersifat positif.

C. Perubahan Mental Melalui Proses Belajar

Belajar pada hakikatnya merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Melalui proses belajar diharapkan terjadi perubahan perilaku, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap (mental).

Belajar merupakan aktivitas manusia untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan sepanjang hayatnya. Kita saksikan seorang ibu dengan penuh kesadaran mengikuti acara keluarga di televisi, dan setelah selesai mengikuti acara tersebut si ibu berubah pengetahuannya. Pak Tani berbincang-bincang dengan temannya mengenai cara-cara memberantas hama tikus, selesai berbincang-bincang Pak Tani tersebut
berubah pula pengetahuan dan ketrampilannya. Seorang remaja mengikuti acara peragaan busana berubah pula pengetahuan dan sikap mentalnya. Masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa belajar.

Belajar memungkinkan seseorang memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap mental. Sepanjang hayatnya manusia dihadapkan pada proses belajar, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk mempertahankan eksistensinya, sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. Melalui belajar, manusia dapat mengenal diri dan lingkungan serta penciptanya, sehingga memahami hak dan kewajibannya.

Dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana di LAPAS, perubahan mental diharapkan terjadi melalui proses belajar, karena narapidana pada hakikatnya adalah orang yang melakukan penyimpangan mental.

1. Latar Belakang Penyimpangan Mental

a. Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan pidana berbeda dengan kejahatan menurut pandangan kriminologi. Pidana membatasi kejahatan pada unsur-unsur tingkah laku yang bertentangan dengan hukum material, sedangkan kriminologi memandang kejahatan sebagai semua tingkah laku manusia yang bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, agama, hukum materil dan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan lain yang tumbuh dalam masyarakat.
Simanjuntak (1977:48) mengungkapkan bahwa: “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak kelakuan tersebut dalam bentuk nestapa.”

Pada hakekatnya kejahatan merupakan prilaku yang tidak sehat, bersifat tidak susila dan merugikan berbagai pihak, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan masyarakat banyak. Jika seseorang membiarkan dirinya tetap sakit dan mogok makan, maka orang itu telah melakukan kejahatan pada dirinya sendiri. Semua kejahatan pada dasarnya hanya ada di lingkungan sosial yang berpenyakit dan tidak stabil. Hal ini dapat kita saksikan dalam kondisi negara dewasa ini, karena pemcrintahan tidak stabil, maka kejahatan merebak dimana-mana dan demonstrasi berlangsung setiap hari.

b. Pathologi sosial

Kejahatan sebetulnya merupakan bagian dari patologi sosial, yang menurut pandangan Kartini Kartono (1981:13) adalah “penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik yang meliputi kemanusiaan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan semua tingkah laku yang berkaitan dengan peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas.”

Sedangkan kaum sosiologi sebagaimana dikutip Kartono (1981:13) mengungkapkan bahwa: “Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral,
hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan bertentangan dengan hukum formal.”

Perbedaan pokok antara kejahatan dengan patologi sosial, bahwa patologi sosial meliputi penyimpangan sebagai gejala kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan kejahatan memandang penyimpangan sebagai tingkah laku manusia. Berkembangnya patologi sosial disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi yang tidak mampu menutupi tuntutan kebutuhan hidup manusia, rendahnya nilai penghayatan dan pengamalan ajaran agama, rendahnya kesadaran untuk mengaplikasikan hukum dalam masyarakat, kesalahan orang tua atau pimpinan masyarakat dalam membina warganya.

Kesenjangan ekonomi menimbulkan ketidak seimbangan hidup dalam masyarakat. Kesenjangan itu pun dapat menimbulkan kecemburuan dari kelompok ekonomi rendah terhadap kelompok ekonomi tinggi, yang jika dibiaran dapat menurut pada kejahatan atau pertentangan. Ketidakstabilan atau pertentangan dan tindak kejahatan lainnya akan dapat direndam apabila kelompok ekonomi kuat dapat menyantuni kelompok ekonomi lemah, artinya kelompok ekonomi kuat harus punya kepedulian terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok ekonomi lemah. Dalam ajaran agama Islam hal ini dilakukan antara lain dengan mewajibkan zakat bagi para umatnya yang mampu dan telah mencapai batas tertentu.

Kejahatan dapat disebabkan oleh rendahnya penghayatan, keyakinan, dan pengamalan terhadap ajaran agama yang berisi larangan-larangan dan perintah untuk berbuat baik. Selain itu, ajaran agamapun mempunyai sanksi yang bersifat
magis yang jika dilanggar akan menimbulkan perasaan dosa dalam hati pelanggarnya sekalipun orang lain tidak mengetahui bahwa ia melakukan pelanggaran terhadap ajaran tersebut. Karena kekuatannya yang bersifat sakral itulah ajaran agama dapat berperan sebagai kendali kehidupan bagi umat manusia yang menganut ajarannya. Dalam hal ini, orang yang memiliki penghayatan dan keyakinan yang tinggi terhadap ajaran agama, cenderung dapat melakukan aturan hidup secara sehat, namun sebaliknya orang-orang yang tidak punya penghayatan dan keyakinan yang tinggi terhadap ajaran agama, cenderung berbuat menyimpang dari aturan hidup. Hal tersebut terjadi karena agama bagi mereka tidak mampu berperan sebagai pandangan hidup (way of life) dan tidak menjadi kendali dalam setiap langkah kehidupannya.

Dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat tradisional, masyarakat berkembang, maupun masyarakat yang sudah maju senantiisa diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum-hukum tersebut berisi perintah dan larangan yang mengandung sanksi dan bertujuan menjaga ketertiban hidup bermasyarakat serta melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu jika hukum ditaati oleh seluruh warga masyarakat, maka ketertiban kehidupan bermasyarakat akan terjamin dan hak-hak warganya akan terlindungi, sehingga akan tercipta kehidupan yang aman dan stabil.

Dalam era demokratisasi dan globalisasi sekarang ini, banyak orang tua yang melupakan tugasnya untuk mendidik anaknya. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, dan ibu konsisten dengan program emansipasinya untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria, padahal dalam ajaran Islam mencari nasbah
merupakan kewajiban suami. Tugas istri yang paling utama adalah mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah, serta berguna bagi agama dan menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarinya.

Sebelum proklamasi kemerdekaan, ketika para ibu belum mengenal program emansipasi, ibu-ibu dengan tekun mendidik anak-anaknya dengan baik, mereka mendidik mengaji, tatarkama dan sopan santun, serta mendidik hidup mandiri. Pendidikan yang dilakukan oleh kaum ibu ketika itu mampu melahirkan sejumlah pemuda yang bertanggung jawab, yang berwatak satria dan patriotik, yang telah mampu membawa bangsa dan negaranya ke pintu gerbang kemerdekaan. Sekarang setelah ada emansipasi dan persamaan gender, banyak tugas pokok ibu yang terlupakan, sehingga sedikit sekali tangan-tangan ibu yang mampu mendidik anaknya dengan baik. Banyak anak-anak pemabuk yang lahir dari tangan-tangan “halus” ibu, yang sering membuat keresahan di masyarakat, sering melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma masyarakat. Hal tersebut telah melahirkan berbagai penyakit sosial yang dampaknya sedang kita rasakan sekarang ini, dimana banyak anak-anak yang terlibat kasus narkoba, pencurian, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan salah satu akibat dari ketidakmampuan orang tua (ibu) dalam mendidik dan mempersiapkan masa depan anak-anaknya.
c. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, pencegahan kejahatan dan upaya penanggulangannya. Simanjuntak (1977:24) menyatakan bahwa:


Kalau phatologi sosial dan kejahatan sebagai realita, maka kriminologi lebih banyak menckankan pada metode, yakni tentang cara-cara membicarakan dan membahas kejahatan serta cara menanggulanginya.

1) Faktor penyebab timbulnya kejahatan

Kejahatan bukan perilaku keturunan dan bukan sifat pembawaan.

Simanjuntak (1977:32) mengemukakan:


Katipan tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya kejahatan antara lain karena tingginya pandangan manusia terhadap kekayaan yang dapat memperlemah penghargaannya terhadap kesusilaan dan martabat manusia. Makin tinggi pandangan manusia terhadap kekayaan dan kedudukan
(harta dan tahta) makin memperlemah penghormatan manusia terhadap martabat manusia. Kondisi seperti itulah yang mudah melahirkan tindak kejahatan.


Pada hakikatnya kejahatan merupakan gejala sosiologis dan bukan gejala antropologis, orang berbuat jahat karena ada sifat meniru dari seseorang terhadap lingkungan jahat dan terhadap pelaku kejahatannya. Dalam mempelajari masalah dan sebab-sebab kejahatan yang terpenting adalah melihat bagaimana keadaan sosial sekelilingnya. Berbagai tindak kejahatan yang sedang terjadi akhir-akhir ini baik di Sampit Kalimantan Tengah, di Maluku, dan di berbagai tempat rawan lainnya di Indonesia pada hakikatnya disebabkan oleh keadaan sosial di sekelilingnya yang kurang stabil, dalam hal ini antara lain tidak atau kurang percayanya masyarakat terhadap para aparatur, baik aparatur pemerintah maupun aparatur keamanan yang ada di lingkungannya.
2) Cara menanggulangi kejahatan


Sutherland sebagaimana dikutip oleh Dirdjosisworo (1984:55) mengemukakan dua teknik penanggulangan kejahatan, yaitu metode reformasi, yakni suatu cara yang ditujukan untuk mengurangi jumlah residivis (penjahat kambuhan) dan metode prevensi, yakni suatu cara yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan.

Metode reformasi menawarkan 5 cara menanggulangi kejahatan sebagai berikut.

a. Teori klasik yang mengungkapkan bahwa cara pengurangan jumlah residivis adalah dengan cara memberikan hukuman yang seberat-beratnya.

b. Reformasi klinis, dimana si penjahat dimasukkan ke dalam sel, dikucilkan seorang diri untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukannya, agar tobat dan menyesali perbuatannya.

c. Metode moralistik, dengan cara memberikan nasihat-nasihat tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral.

d. Metode resolusi, dengan jalan menekan penjahat agar memberikan jaminan untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

e. Metode penempatan narapidana, dengan pengawasan yang konstan.

Dari berbagai metode tersebut, yang banyak dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dewasa ini adalah metode moralistik, yakni memberikan pembinaan baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan maupun yang menyangkut
sikap dan nilai agar para narapidana setelah kembali ke masyarakat tidak menjadi residivist.

Sedangkan metode prevensi dilakukan dengan cara melakukan tindakan awal terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kemiskinan dengan cara memberikan kesejahteraan agar tidak timbul kejahatan. Memberikan pengarahan-pengarahan umum pada masyarakat yang tidak memperoleh informasi, agar mereka tidak melakukan kejahatan, dan seterusnya. Metode prevensi merupakan cara yang paling aman untuk mencegah kejahatan, karena kalau orang sudah terjun ke dunia kejahatan sulit untuk memperbaiki sikap dan perilaku jahatnya, kalaupun bisa membutuhkan waktu lama.

Kejahatan dapat dicegah dengan penyebaran anti kejahatan. Misalnya, kejahatan ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan, ditanggulangi dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan memperluas lapangan kerja (seperti jaring pengaman sosial dan program pengembangan kecamatan). Cara ini mahal, tapi akan lebih mahal lagi menanggulangi orang-orang yang sudah terjun ke dunia kejahatan.

Dalam perspektif PLS, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang benar dan tepat, baik dalam kaitannya dengan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap. Penanggulangan kejahatan melalui proses pendidikan dirasakan cukup efektif dan dapat memberikan hasil yang memuaskan.
2. Beberapa Pandangan tentang Narapidana


Lombroso berpendapat bahwa penjahat umumnya dipandang dari sudut anthropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (‘genus homo delinquens’), seperti halnya dengan bangsa Negro. Mereka dilahirkan demikian, (‘il delinquente nato’), mereka tidak mempunyai predisposisi untuk kejahatan, tapi suatu predinsiasi, dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya. Sifat batin sejak lahir ini juga dapat dikenal dari adanya stigmata-stigmata lahir, jadi terdapat suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

Kendatipun ajaran Lombroso ini tidak dapat diterima oleh para ahli kriminologi, namun karena karyanya ini, para ahli ter dorong untuk lebih memusatkan perhatiannya pada pribadi si penjahat, bakat dan lingkungannya.

b. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan


Untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertama-tama keadaan masa lampuannya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu, tetapi seseorang yang pada masa lampuannya telah melakukan kejahatan kenakalan anak-anak, belum tentu setelah dewasanya ia jadi penjahat mungkin juga ia menjadi seorang yang baik.
Pendapat Sutherland yang menyatakan bahwa kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, kiranya sejalan dengan sabda Rasulullah S.A.W. yang artinya kira-kira: “Perhatikan lingkungan tetanggamu sebelum kamu mendiami rumah”. Jelaslah bahwa ajaran Islam pun sangat memperhatikan adanya pengaruh dari lingkungan. Sejalan dengan itu, ajaran Islam juga menolak pandangan bahwa sifat jahat itu diwariskan, seperti yang dikemukakan dalam sabda Rosulullah S.A.W. yang artinya kira-kira: “Tidak ada seorang anakpun, melainkan dilahirkan atas kesucian, tetapi ibu - bapaknyalah yang me-Yabudikannya, me-Nasranikannya dan memusyirkannya” (Riwayat Muslim).

Dari uraian di atas nyatalah betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap pemberitakan watak dan perilaku manusia, sehingga dikenal adanya daerah hitam, daerah rawan dan sebagainya. Termasuk ke dalam pengaruh lingkungan ini adalah pendidikan, keadaan ekonomi, politik, lingkungan fisik (alam), dan budaya, serta gaya hidup masyarakat.

Kejahatan tidak mesti dilakukan oleh orang miskin atau yang kurang pendidikan, tak sedikit orang pintar dan kaya yang melakukan kejahatan yang disebut "white collar crime". Hal ini dapat disaksikanakhir-akhir ini, setelah tumbangnya rezim "anthouchable" orde baru, kesemrawutan (chaos) berlangsung dimana-mana, dilakukan bukan saja oleh rakyat kecil tapi juga oleh para pejabat teras, tidak saja oleh orang-orang yang tidak tahu nilai-nilai agama tetapi yang sangat mengkhawatirkan justru dilakukan juga oleh para pemimpin agama,
dengan mempertahankan pendapatnya dan memaksakan kehendaknya sendiri untuk kepentingan ambisi pribadi atau golongan, dan lebih parah lagi mereka senantiasa mengatasnamakan umat (Audubillahimindalik).

Terbongkarnya pelaku pemboman berencana di berbagai tempat, yang menunjukkan keterlibatan para haji di jalan Jakarta Bandung membuktikan bahwa kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang yang tidak beragama, tapi bisa dilakukan oleh orang-orang yang beragama, bahkan sifatnya lebih parah lagi. Hal ini tidak lain karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh lingkungan yang kurang kondusif.

c. Mazhab Bio-Sosiologi


Ferri menyatakan bahwa dua orang yang sama-sama mengalami keadaan yang jelek, tidak semuanya jadi jahat. Ini tidak lain daripada suatu hipotesis belaka, karena dalam kenyatannya memang tidak ada dua orang yang pernah
hidup betul-betul dalam keadaan yang sama. Perbedaan sedikit pada masa kecil
tidak mustahil menyebabkan perbedaan besar pada waktu dewasa.

d. Mazhab Spiritualis

Mazhab spiritualis sebagai salah satu aliran dalam kriminologi berpedapat
bahwa kurangnya penghayatan terhadap agama merupakan penyebab terjadinya
kejahatan.

Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dari penelitian yang
dilakukan oleh para ahli kriminologi menunjukkan bahwa: “anggota-anggota
gereja sangat jarang masuk penjara daripada orang-orang gereja yang bukan
anggota gereja” (Martasaputra, 1973:314). Namun pendapat mazhab inipun
agaknya dapat dibantah oleh kenyataan yang ada. Kesalahan pokok yang menjadi
dasar dari pendapat ini bahwa tidak beragama mendorong untuk berbuat
kejahatan. Padahal tidak sedikit fakta orang yang beragama melakukan tindak
kejahatan, bahkan banyak yang menggunakan agama sebagai kedok untuk
menutupi kejahatannya.

4. Pendidikan Untuk Mengubah Mental Narapidana

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan langsung
dengan segala aspek kehidupan manusia yang menyangkut setiap individu. Hal
tersebut dikarenakan pendidikan berperan dan berpengaruh secara langsung
terhadap perkembangan manusia dengan seluruh aspek kepribadiannya. Kalau
bidang-bidang lain seperti: ekonomi, pertanian, perindustrian dan sebagainya
berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, maka pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya.

Sistem pemasyarakatan pada hakekatnya berupaya melindungi masyarakat terhadap diulanginya tindak kejahatan oleh bekas narapidana dan agar orang yang telah tersesat itu menyadari kesalahannya, dapat kembali ke jalan yang benar serta menjadi warga yang baik dan berguna, sehingga dapat kembali serta diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para penegak hukum berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana (narapidana) itu perlu dididik atau perlu mendapat pendidikan. Hal ini penting agar bekas narapidana tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak, serta membantu mereka untuk berperan serta dalam pembangunan (Soegondo 1994:8). Di samping itu, para narapidana yang telah berbuat kejahatan seperti dikemukakan di atas pada hakekatnya memiliki hasrat dan kemauan sebagaimana layaknya manusia, sehingga masih dapat diharapkan untuk menjadi manusia yang berguna.

Bagi mereka yang menurut para penegak hukum dianggap sudah “tidak dapat” diperbaiki atau dididik karena telah melakukan kejahatan yang luar biasa kejinya, kronis atau karena terlalu berat kesalahannya diberlakukan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman semacam ini secara sosiologis tidak lagi bertujuan memasyarakatkan kembali si pelanggar hukum karena menurut para penegak hukum bahwa masyarakat perlu dilindungi oleh kemungkinan terulangnya kembali tindak kejahatan serupa oleh pelakunya.

289) salah seorang yang terkemuka di antara kaum Kong-Fu-Tze menyatakan, bahwa manusia asal mulanya dan secara essensial adalah baik.

Dalam ajaran Agama Islam, Rosulullah S.A.W. bersabda bahwa: “Tidak ada seorang anak pun, melainkan dilahirkan atas kesucian, tetapi ibu - bapaknyalah yang meyahudikannya, menasraniannya dan memusyrikkannya” (Riwayat Muslim). Hal tersebut tidak hanya diakui oleh para ahli yang menganut agama Islam, tetapi juga oleh ahli lain. Misalnya, teori tabula rasa yang mengemukakan bahwa anak dilahirkan ke dunia bagaikan kertas putih bersih, perkembangannya tergantung pada tulisan-tulisan yang diterakan pada kertas tersebut.


Pendidikan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perlu lebih ditekankan pada pendidikan keagamaan di samping pendidikan ketrampilan, agar
tertancam nilai-nilai kebenaran dan terbentuk pribadi yang positif serta beriman terhadap Allah SWT. Hal tersebut perlu direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya melalui berbagai model pendidikan, antara lain andragogi. Dalam proses pendidikan melalui model andragogi, narapidana dipandang sebagai insan yang masih dimungkinkan untuk dapat menyumbangkan potensinya bagi masyarakat, bangsa dan negara, karena sebenarnya mereka itu masih mempunyai rasa kemanusiaan, dan keimanan. Hanya, bahwa rasa itu ada tetapi kemungkinan sangat tipis, atau rendah karena dikalahkan atau diintervensi oleh dunia rasa lain yang lebih dominan. Abdulsyani (1987:142-143) mengemukakan bahwa:

Masyarakat Indonesia sedang membangun dan narapidana adalah warga negara, yang dalam hal tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan bangsa sama nilainya dengan warga negara lainnya, sehingga harus diturutsertakan dalam pembangunan, yang bila tidak, akan menurunkan nilai martabatnya sebagai warga negara.

Untuk mengaktualisasikan potensi yang masih ada pada diri narapidana, diperlukan waktu yang cukup lama serta upaya dan sarana yang lebih memadai. Lamanya waktu pendidikan yang diperlukan antara lain bertujuan agar mereka menjadi manusia yang utuh dan sadar akan dirinya serta berbuat sesuai dengan tata nilai yang hidup di masyarakat. Kita mendambakan hari esok narapidana tersebut berkepribadian sesuai dengan tata nilai yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi lingkungannya, bukan menjadi sampah masyarakat.
D. Hasil Studi Terdahulu

Hasil studi terdahulu menunjukkan masih langkanya pengkajian terhadap pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasayarakatan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Bahkan, topik tentang pengembangan model pembelajaran dapat dikatakan “belum ada”.


4. Studi yang dilakukan oleh Rasas (1997) tentang *Dunia Sosial Narapidana (studi tentang kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan Banceuy Bandung)*, antara lain menyimpulkan bahwa: “petugas lembaga pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sebagai gurú yang harus tahu tentang pemasyarakatan, dan tingkah laku sehari-hari narapidana; sebagai orang tua, yang harus memberikan perlindungan atau pengayoman, bertindak tenang dalam menghadapi persoalan, dan bertindak adil terhadap narapidana; sebagai pembina, harus dapat menimbulkan semangat kerja, dan kemampuan melihat hari depan pada diri narapidana”.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan perhinya dikembangkan model pembelajaran yang efektif bagi pembinaan narapidana; dalam hal ini model andragogi bagi pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.